PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan penggunaan rupiah dan ringgit dalam penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap aspek pelaku, kegiatan keuangan, dan transaksi keuangan;

b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/12/PADG/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ukuran (*size*);
 - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 - c. kompleksitas (*complexity*).
 - (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan:
 - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
 - b. rekomendasi dari otoritas Malaysia; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Malaysia.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Malaysia.
- (1a) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Malaysia di Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Ringgit pada Bank ACCD Malaysia.
 - (1a) Pembukaan SNA Ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Ringgit di Bank ACCD Malaysia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Malaysia.
 - (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Ringgit pada masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).
4. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Malaysia di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
 - (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
 - (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Malaysia yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.
5. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah saldo SNA Ringgit dari suatu Bank ACCD Indonesia di seluruh Bank ACCD Malaysia dibatasi paling banyak sebesar MYR200,000,000 (dua ratus juta ringgit) pada akhir Hari.
- (1a) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Ringgit tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.

- (2) Dalam hal saldo SNA Ringgit pada akhir Hari melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap kelebihan saldo SNA Ringgit tersebut dapat digunakan untuk:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit, pada Hari berikutnya.
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Ringgit bagi Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
 - (1a) Pembukaan Sub-SNA Ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Ringgit di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah LCS Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Ringgit.
 - (2) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Ringgit bagi pihak lain selain Nasabah LCS Indonesia.
 - (3) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Ringgit.
 - (4) Pemberian bunga atau bagi hasil pada Sub-SNA Ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Posisi transaksi *swap* ringgit terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lain atau Bank ACCD Malaysia dilarang melebihi MYR200,000,000 (dua ratus juta ringgit) pada akhir Hari.
- (2) Dalam melakukan transaksi *swap* rupiah terhadap ringgit atau valuta asing dengan Bank ACCD Malaysia, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak dapat melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan:
 - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia.
 - (2) Transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
 - (3) Nominal dan jangka waktu transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
 - (4) Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain ringgit.
9. Bab V dihapus.
10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Underlying Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit meliputi:

- a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 1. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Malaysia;
 2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan/atau
 - 3) investasi lain; dan
 3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain, tetapi tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- b. kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 1. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia, dengan batasan

- minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
 - 2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
 - 3. pengeluaran modal oleh Nasabah LCS Indonesia pada entitas di Malaysia atau proyek di Malaysia berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;
 - c. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 - 1. surat utang;
 - 2. saham; dan/atau
 - 3. kegiatan investasi portofolio lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Malaysia;
 - d. kegiatan transaksi modal antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 - 1. transfer modal termasuk hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa;
 - 2. pembelian atau penjualan aset bukan finansial berupa hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain; dan/atau
 - 3. kegiatan transfer modal lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Malaysia; dan
 - e. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah LCS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia bersama otoritas Malaysia;
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.

- (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha dari otoritas kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait untuk:
 - a. Aksi Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
 - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
 - a. otoritas di Malaysia; dan/atau
 - b. otoritas terkait di Indonesia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 54 diubah, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:

Departemen Internasional dan
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan
DPPK-KPVA@bi.go.id.

- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id.
- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (4a) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

14. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan ringgit untuk meningkatkan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dapat berjalan baik dan terstruktur.

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, diperlukan peningkatan fleksibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Peningkatan fleksibilitas dan efisiensi tersebut akan dilakukan dalam bentuk penyempurnaan kriteria Bank ACCD, penyempurnaan mekanisme pengakhiran penunjukan Bank ACCD, penyesuaian mekanisme pembukaan rekening terkait transaksi bilateral rupiah dan ringgit, penyesuaian *threshold*, penyesuaian batasan saldo Bank ACCD pada akhir Hari, serta penyesuaian *Underlying* Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank B dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank C yang keduanya merupakan Bank ACCD Malaysia.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Ringgit di Bank Y dan 1 (satu) SNA Ringgit di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Malaysia.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)
Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia dapat membuka SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jumlah saldo di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia.

Pada akhir Hari tanggal 1 Agustus 2020, saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A total sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen pada Bank A yang akan melaksanakan transaksi ketika saldo SNA Rupiah melebihi limit dengan informasi bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk:

- a. membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia;
- b. melakukan investasi langsung; atau
- c. melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Ringgit di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Malaysia. Total saldo keseluruhan di Bank X, Bank Y, dan Bank Z paling banyak sebesar MYR200,000,000 (dua ratus juta ringgit) pada akhir Hari.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Ringgit di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Malaysia. Pada akhir Hari tanggal 31 Juli 2025, total saldo keseluruhan SNA Ringgit Bank A di Bank X, Bank Y, dan Bank Z sebesar MYR250,000,000 (dua ratus lima puluh juta ringgit). Saldo SNA Ringgit tersebut dapat melebihi limit MYR200,000,000 (dua ratus juta ringgit) sepanjang Bank A memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Malaysia.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Perhitungan posisi transaksi *swap* rupiah terhadap ringgit atau valuta asing dapat dilakukan secara *gross* atau *netting*. Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Angka 8

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan

Nasabah LCS Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Malaysia, melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR150,000 (seratus lima puluh ribu ringgit) atau setara USD33,700 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian MYR/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir A.

Ayat (3)

Contoh:

Importir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Malaysia yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar MYR1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu ringgit) atau setara USD57,100 (lima puluh tujuh ribu seratus dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut, importir B dapat melakukan transaksi pembelian MYR/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar MYR1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu ringgit) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir X yang merupakan Nasabah LCS Malaysia sebesar USD1,000,000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar MYR4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu ringgit) dengan kurs USD/MYR sebesar 4,15. Berdasarkan tagihan tersebut, importir C dapat melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu ringgit).

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral

menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Angka 13

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.